



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data, temuan lintas kasus dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah.

1. Implementasi kebijakan kepala sekolah dalam penyediaan sarana pembelajaran untuk meningkatkan kinerja guru dilakukan dengan cara mengadakan rapat awal semester, workshop pembuatan perangkat pembelajaran, pemenuhan sarana dan prasarana, serta meningkatkan koordinasi antarguru. Rapat awal semester dilaksanakan untuk mendata kebutuhan guru terkait proses pembelajaran yang akan dilakukan.
2. Implementasi kebijakan kepala sekolah dalam memberikan supervisi guru dilakukan dengan cara pemberian supervisi administrasi dan supervisi langsung, mengikutsertakan guru dalam seminar, *workshop* atau diskusi ilmiah yang berkaitan dengan peningkatan mutu pembelajaran serta membentuk tim khusus supervisi untuk membantu tugas kepala sekolah.
3. Implementasi kebijakan kepala sekolah dalam hal pembinaan kenaikan jabatan guru untuk meningkatkan kinerja guru dilakukan dengan cara pengembangan diri guru, pembinaan kedisiplinan guru serta memberikan promosi jabatan.

B. Implikasi Penelitian

1. Implikasi Teoretis

Hasil penelitian ini menguatkan dan mengembangkan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle bahwa dalam implementasi kebijakan kepala sekolah dipengaruhi oleh dua variabel besar yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi kebijakan. Merilee juga memperkenalkan model implementasi sebagai proses politik dan administrasi.

Proses politik dapat terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan yang dilakukan oleh kepala sekolah sebagai proses politik, dalam hal ini melibatkan semua aktor kebijakan. Adapun aktor kebijakan yang ada di sekolah adalah *stakeholder*, yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru. Jadi, temuan baru dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan kepala sekolah melibatkan semua *stakeholder* dalam meningkatkan kinerja guru. Kebijakan tersebut terbukti bahwa semua *stakeholder* terlibat dalam penyediaan sarana pembelajaran, supervisi guru, dan pembinaan jabatan guru.

2. Implikasi Praktis

Implementasi kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru dapat dilaksanakan dengan melibatkan semua warga sekolah dalam penyediaan sarana pembelajaran, supervisi guru dan pembinaan jabatan guru.

Implikasi kebijakan kepala sekolah dalam hal penyediaan kelengkapan pembelajaran dilakukan dengan melakukan rapat awal tahun guna mendata kebutuhan guru selama proses belajar mengajar, *workshop* pembuatan perangkat pembelajaran, pemenuhan sarana dan prasarana, serta meningkatkan koordinasi antarguru. Sementara itu terkait supervisi guru dilakukan dengan pemberian supervisi administrasi dan supervisi langsung, memberikan bantuan wawasan kepada guru, mengikutsertakan guru dalam seminar, *workshop* atau diskusi ilmiah yang berkaitan dengan peningkatan mutu pembelajaran serta membentuk tim khusus supervisi untuk membantu tugas kepala sekolah. Sementara itu implementasi kebijakan kepala sekolah terkait pembinaan kenaikan jabatan dilaksanakan dengan pengembangan diri guru, pembinaan kedisiplinan guru, serta memberikan promosi jabatan.

Implikasi tersebut sangat berguna bagi para pimpinan lembaga pendidikan, yang berstatus negeri maupun swasta dalam melaksanakan kebijakan seputar penyediaan sarana pembelajaran, supervisi guru, dan pembinaan kenaikan jabatan guru.



C. Saran

Berdasarkan keseluruhan uraian yang telah paparkan maka saran yang dapat peneliti berikan kepada berbagai pihak sebagai berikut:

1. Para kepala sekolah dan guru hendaknya mengimplementasikan kebijakan kepala sekolah dengan besar hati dan penuh tanggung jawab serta dilandasi dengan nilai-nilai religius agar kebijakan itu bisa terlaksana dengan baik.
2. Lembaga pendidikan hendaknya memperhatikan kinerja guru dengan baik karena guru merupakan *human capital* dan modal utama dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.
3. Pemerintah daerah hendaknya memperhatikan pengelolaan semua lembaga pendidikan, baik sekolah dan madrasah. Dalam hal ini antara sekolah yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan madrasah dikelola oleh Kementerian Agama Kabupaten. Jadi, antara sekolah dan madrasah dikelola secara bersama sama oleh pemerintah daerah.